

PERAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM MEWUJUDKAN NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH GUNA MENGHASILKAN "GOOD POLICY"

Maha Shania Tara Gusmoi¹, Dila Tri Wulananzani²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2}

E-mail: mahashania28@gmail.com

ABSTRAK

Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristic, Penelitian ini diambil untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kebijakan Sektor Publik, yang di mana setiap mahasiswa Fisip Universitas Galuh Ciamis program studi ilmu pemerintahan yang praktikum wajib mengetahui kebijakan sektor publik yang berlaku. perlu kita ketahui setiap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya sudah memiliki planing tertentu untuk mewujudkan kebijakan yang baik, yang nantinya adil ketika di terapkan dan efektif ketika digunakan Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah data sekunder, data primer, dalam penelitian kualitati Ada beberapa penerapan kebijakan yang baik, yang di gunakan DPRD, namun kali ini yang saya ambil mengenai Naskah Akademik Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat urgen untuk segera dibentuk. Untuk mewujudkan sebuah Perda yang ideal maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Naskah Akademik BMD ini.

Kata Kunci: Penelitian Naskah Akademik BMD

ABSTRACT

Academic Papers are the raw materials needed in the formation of laws and regulations, including Regional Regulations. With the support of adequate academic papers, it is hoped that good laws and regulations can be formed, in an applicable and futuristic sense. practicum must know the applicable public sector policies. We need to know that each Regional House of Representatives certainly has certain plans to realize good policies, which will be fair when implemented and effective when used. The research used in writing this scientific article is secondary data, primary data, in qualitative research. There are several implementations of policies. the good one, which is used by the DPRD, but this time what I took is the Academic Paper for the Management of Regional Assets. The formation of the Ciamis Regency Regional Regulation concerning the Management of Regional Property is also in the context of implementing the provisions of Article 105 and Article 110 paragraph (2) Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Management of State/Regional Property and Article 511 paragraph (1) Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Assets. Based on these conditions and facts, the

existence of the Ciamis Regency Regional Regulation concerning the Management of Regional Property is very urgent to be formed immediately. In order to realize an ideal regional regulation, the Academic Paper Drafting of the Ciamis Regency Regional Regulation on the Management of Regional Property was carried out. On the basis of the above thoughts, the Government of Ciamis Regency stipulates this BMD Academic Paper.

Keywords: *BMD Ciamis Academic Manuscript Resear*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Negara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membentuk negara kesejahteraan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan dalam Lukman Hakim menyebutkan kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.

METODE

Proses pelaksanaan praktik mata kuliah Kebijakan Sektor Publik dan pengumpulan data di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik pengamatan secara langsung. Juga menggunakan Data primer dan sekunder. Serta menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.

Kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dimaksudkan untuk menyiapkan naskah akademik yang dapat digunakan acuan dan/atau bahan pertimbangan dalam penyusunan ketentuan umum, maksud dan tujuan, kebijakan pengelolaan barang milik Daerah di Kabupaten Ciamis. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat urgen untuk segera dibentuk. Untuk mewujudkan sebuah Perda yang ideal maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ruang lingkup Barang Milik Negara/Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tersebut mengacu pada pengertian Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan mengenai lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dibatasi pada

pengertian Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan Pemerintah ini juga melingkupi Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan manajemen aset secara memadai. Dalam manajemen aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam

memberikan pedoman pengelolaan aset negara/daerah, maka pada tahun 2006 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Akhir Praktikum Kebijakan Sektor Publik kelas A Tingakt 2.* Fisip Universitas Galuh, Ilmu Pemerintahan. Ciamis: Selasa. Dipetik Desember Selasa, 2022
- SHANIA, G. T. 2022. *Laporan Akhir Praktikum DPRD Kabupaten Ciamis 2022 Kelas A.* Laporan Akhir Praktikum Ksp, Fisip Universitas Galuh Ciamis Jawa Barat, Ilmu Pemerintahan, Ciamis. Dipetik Desember Selasa, 2022.
- Maha, g. T. 2022. *Hasil laporan akhir praktikum ksp dprd kab. Ciamis 2022.* Laporan akhir, fisip unigal ciamis, ilmu pemerintahan, ciamis. Dipetik desember selasa, 2022
- Hakim, Lukman. 2011. *"Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan."* Jurnal Konstitusi 4.1
- Basah, Sjachran. 1989. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia.* Alumni,
- Aira, Aras. 2015. *"Peran manajemen aset dalam pembangunandaerah."* Kutubkhanah 17. 1 : 21-39.
- Nyoman S, 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah,* Citra Utama, Jakarta, hal. 39.